

**LAPORAN**

**STATUS LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAERAH KABUPATEN KEEROM**  
**TAHUN 2008**



**Diterbitkan : 2008**  
**Data : September 2007 – Agustus 2008**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**PROVINSI PAPUA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan bimbinganNya sehingga penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2008 dapat diselesaikan. Laporan ini memberi gambaran tentang Status Lingkungan hidup di Kabupaten Keerom pada kurun waktu satu tahun yang di sebabkan oleh berbagai kegiatan manusia. Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan berbagai kegiatan manusia dengan alam sebagai suatu hubungan sebab akibat.

Fokus utama SLHD adalah informasi tentang kegiatan atau berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi sumber daya alam seperti air, udara, laham,hutan, keaneka ragam hayati, pesisir dan sebagainya, selain itu SLHD juga berisi respon pemerintah, masyarakat, LSM, swasta terhadap pengelolaan lingkungan terutama dalam mengatasi dampak, dan mendorong perbaikan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan.

Sebagai Kabupaten baru maka lingkungan hidup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Keerom oleh karena itu penerapan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus menjadi sentral dalam penetapan kebijakan pembangunan. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Keerom merupakan salah satu kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengukur kinerja lingkungan di daerah.

Terima Kasih Tuhan Memberkati

Keerom,        September 2008

BUPATI KEEROM,

**Drs. CELSIUS WATAE**

## **TIM PENYUSUN**

- 1. Ir. Frans Tanga (Ketua Tim)**
- 2. Hendy Rabang Matasik, ST (Sekretaris)**
- 3. Esau Awaytouw, SH, M.Si. (Anggota)**
- 4. Martha Ruru, SE (Anggota)**
- 5. Nirvana Ismail, S.Sos (Anggota)**
- 6. Yan Banundi, SE (Anggota)**
- 7. Trisiswanda Indra N, S.Pt (Anggota)**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tujuan .....	I-2
C. Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Keerom.....	I-2
D. Strategi Kebijakan Pembangunan Lingkungan.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM .....	II-1
A. Visi dan Misi Kabupaten Keerom .....	II-1
B. Geografi .....	II-2
C. Demografi .....	II-2
D. Geologi.....	II-3
E. Tata Ruang.....	II-4
F. Kesehatan Masyarakat .....	II-4
BAB III AIR .....	III-1
A. Umum.....	III-1
BAB IV UDARA.....	IV-1
A. Umum.....	IV-1
BAB V LAHAN DAN HUTAN .....	V-1
A. Status .....	V-1
B. Respon.....	V-2
BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI .....	VI-1
A. Status .....	VI-1
B. Tekanan .....	VI-2
C. Respon.....	VI-2

BAB VII PESISIR DAN LAUT.....	VII-1
A. Status .....	VII-1
 BAB VIII LINGKUNGAN PERMUKIMAN .....	 VIII-1
A. Status .....	VIII-1
B. Tekanan .....	VIII-2
C. Respon.....	VIII-3
 BAB IX AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	 IX-1
A. Umum .....	IX-1
B. Program Pemulihan Kualitas Lingkungan .....	IX-2
C. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan .....	IX-2
D. Rincian Tindak Lanjut.....	IX-2
E. Penutup .....	IX-5
 DAFTAR PUSTAKA.....	 DP-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sungai di Kabupaten Keerom yang membawa sediment dan Kayu – kayu yang menyebabkan banjir di Distrik Arso dan Skanto .....	III-3
Gambar 2 Pengujian air pada sungai yang digunakan oleh masyarakat .....	III-4
Gambar 3 Papan informasi dalam rangka sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dan bahaya banjir serta penataan drainase pada perkebunan Kelapa sawit .....	III-4
Gambar 4 Kondisi hutan di Kabupaten Keerom yang masih virgin .....	IV-2
Gambar 5 Perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN II Arso .....	V-1
Gambar 6 Kangguru Pohon Mantel Emas .....	VI-2

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Keerom terbentuk pada tanggal 12 April 2003 berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, 14 (Empat Belas) Kabupaten di Provinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan lembar Negara Nomor 4245) dan sejak Bulan Oktober Tahun 2005 merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayapura yang sudah definitive ditandai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2005 – 2010 melalui Pilkada langsung.

Sebagai Kabupaten baru maka lingkungan hidup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Keerom oleh karena itu penerapan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus menjadi sentral dalam penetapan kebijakan pembangunan. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Keerom merupakan salah satu kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengukur kinerja lingkungan di daerah.

Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan sebagai salah satu indicator dalam mengukur kinerja lingkungan di daerah yang dapat memberikan suatu informasi lingkungan, oleh karena itu informasi tentang lingkungan hidup perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

## B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Keerom 2008 bertujuan:

- a. Menyediakan fondasi yang kuat berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup daerah.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e. Secara khusus, mengetahui tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tahun 2008.

## C. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEEROM

Pengukuran kinerja lingkungan yang berkelanjutan berkaitan dengan 3 (tiga) variabel yaitu kondisi vegetasi hutan, energi, akses sumber daya air dan sanitasi. Kabupaten Keerom dalam menyusun Status Lingkungan tahun 2008 yang merupakan salah satu indikator dalam penentuan kinerja lingkungan berkelanjutan menghadapi permasalahan atau isu lingkungan hidup yang sangat menonjol dan sejak lama belum terpecahkan dengan baik sampai saat ini adalah masalah **banjir**. Isu lingkungan di Kabupaten Keerom yang juga belum terpecahkan hingga kini adalah pengalihan **fungsi kawasan untuk permukiman dan industri kelapa sawit** mengakibatkan meningkatnya lahan kritis. Isu lingkungan yang berkaitan dengan **penataan ruang** untuk penentuan ibukota Kabupaten Keerom yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan. Isu lingkungan yang berkaitan dengan **sumber – sumber air bersih** .



Laporan ini, memuat tentang masalah-masalah yang muncul dan sedang dialami yaitu masalah banjir dan merupakan program prioritas hal ini disebabkan karena sebelum terbentuk menjadi kabupaten baru beberapa wilayah seperti pada Distrik Arso dan Distrik Skamto di Kabupaten Keerom setiap tahun telah mengalami banjir tahunan, namun setiap distrik di Kabupaten Keerom akan dibahas sebagai berikut:

1. Distrik Arso, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
  - a. Sebagai pusat pemerintahan pada Kabupaten Keerom maka pembukaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana menjadi prioritas tanpa mempertimbangkan fungsi kawasan.
  - b. Banjir tahunan di wilayah Arso Kota.
  - c. Penebangan dan pembakaran hutan yang akan digunakan untuk perladangan yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis.
  - d. Sumber air bersih yang belum memenuhi standar kesehatan.
  - e. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
  
2. Distrik Skamto, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
  - a. Banjir tahunan.
  - b. Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan .
  - c. Sumber air yang belum memenuhi standar kesehatan.
3. Distrik Waris, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
  - a. Pembukaan lahan untuk industri kehutanan, permukiman karena merupakan daerah perbatasan negara antara Indonesia dan Papua New Guinea.
  - b. Pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan peruntukaannya.
4. Distrik Senggi, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
  - a. Pembukaan lahan untuk industri kehutanan, serta peladangan berpindah.Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu lingkungan yang ada di Kabupaten Keerom, selama 2008, adalah:
  1. Isu Banjir
  2. Isu Pembukaan lahan untuk sarana dan prasarana
  3. Isu Perladangan berpindah dengan cara menebangi pohon.
  4. Isu sumber air bersih yang belum memenuhi standar kesehatan
  5. Isu Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit
  6. Isu Penata Ruang untuk Pembangunan berwawasan Lingkungan

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam upaya melaksanakan pembangunan bidang lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Keerom dalam kelembagaan dari melalui Kantor Lingkungan Hidup akan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom yang baru di bentuk pada Tahun 2008 sebagai instansi teknis yang menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Keerom. Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam analisis dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **D. STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang berwawasan lingkungan. Artinya dalam melaksanakan pembangunan harus mempertimbangan aspek ketataruangan serta lingkungan agar tidak terjadi masalah di masa mendatang. Tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan pembangunan lingkungan adalah:

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pemulihan, dan penangan sumber daya alam.
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia bagi aparatur pemerintah.
4. Memperbaiki lingkungan yang rusak/menjadi terganggu keseimbangannya agar berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup .
6. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan pemanfaatan lahan kritis menjadi lahan produktif.

Sejalan dengan strategi kebijaksanaan dan program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka program prioritas adalah:

1. Pengendalian banjir.
2. Penataan Ruang.
3. Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan.
4. Penyediaan dan pengelolaan Air Baku.
5. Peningkatan SDM Bidang Lingkungan Hidup bagi aparatur pemerintah.
6. Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. VISI DAN MISI KABUPATEN KEEROM**

Upaya Pemerintah Kabupaten Keerom untuk melakukan pembangunan di segala bidang dengan melakukan beberapa program prioritas, dan untuk mendukung kegiatan tersebut maka visi Kabupaten adalah "membangun jati diri sebagai identitas masyarakat Keerom" yang berarti selama 5 (lima) tahun ke depan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk membangun jati diri sebagai identitas masyarakat Keerom. Untuk itu Arah kebijaksanaan Umum pembangunan Kabupaten Keerom pada Tahun 2008 meliputi 4 (empat) program prioritas yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Bidang Infrastruktur serta Program Penunjang lainnya. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang kemudian disusul dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun banyak hambatan dan masalah yang dihadapi meliputi aspek kehidupan masyarakat yaitu masalah ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana yang ditandai dengan belum stabilnya tatanan ekonomi, keuangan, pengangguran, kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat. Dengan sejumlah masalah dasar tersebut perlu dicarikan upaya pemecahannya melalui beberapa strategi dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang dan akan dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memperkuat basis ekonomi melalui pemerataan yang adil, aman, damai dan demokratis. Pemanfaatan sumber daya daerah efektif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan dan pemberdayaan Sumber daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju, profesional dan mandiri;
3. Pemerataan pembangunan yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dengan menciptakan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat;
4. Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta lingkungan hidup.

Hambatan dan kendala Kabupaten Keerom sedang giat – giatnya melaksanakan

pembangunan. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom sebagai instansi teknis yang menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Keerom. Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom adalah melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yaitu salah satunya adalah terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta terciptanya efisiensi, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

## B. GEOGRAFI

Kabupaten Keerom memiliki luas 9.365 Km<sup>2</sup>, terletak antara 140°15'0" - 141°0'0" LS dan 2°37'0" - 4°0'0" BT dengan batas wilayah Kabupaten Keerom sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Jayapura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pengunungan Bintang
- Sebelah Barat : Kabupaten Jayapura
- Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea (PNG)

Kabupaten Keerom terbagi atas 5 (lima) distrik yaitu Distrik Waris, Distrik Arso, Distrik Senggi, Distrik Web dan Distrik Skanto dengan Distrik Senggi sebagai daerah terluas yaitu 3.088 Km<sup>2</sup> dan Distrik Waris merupakan daerah terkecil dengan luas 911,94Km<sup>2</sup> sebagai berikut:

No	Distrik	Luas (Km <sup>2</sup> )	Rasio terhadap Total (%)
1	Waris	911,94	9,74
2	Arso	2.097,36	22,40
3	Senggi	3.088,55	32,98
4	Web	1.762,50	18,82
5	Skanto	1.504,65	16,07

Sumber: Keerom dalam Angka tahun 2007

## C. DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2006 berdasarkan angka proyeksi berjumlah 47.206 jiwa dengan penduduk laki – laki merupakan populasi terbesar yaitu 25.623 jiwa atau sebesar 54,28% dari penduduk Keerom. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 21.583 jiwa atau 45,72% dari seluruh penduduk Keerom. Dengan luas wilayah 9.365 km<sup>2</sup> berarti kepadatan penduduk hanya mencapai 5,04 artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> hanya dihuni oleh 5 orang penduduk.

Jumlah penduduk yang demikian kecil diikuti oleh tingkat pendidikan penduduk yang

sangat rendah, penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD sebesar 16,69%, sedangkan penduduk yang tamat SD dan SLTP sebesar 33,03% dan 17,27%. Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMA, Diploma maupun sarjana rata – rata di bawah 5% dari jumlah penduduk di Kabupaten Keerom.

Berdasarkan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Keerom sebagai berikut:

No	Distrik	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
1	Waris	1.770	1.574	3.344	112,45
2	Arso	12.831	10.706	23.537	119,85
3	Senggi	1.200	974	2.174	123,20
4	Web	1.879	1.481	3.360	126,87
5	Skanto	7.943	6.848	14.791	115,09
	Jumlah 2006	25.623	21.583	47.206	118,72
	2005	24.778	20.871	45.649	118,72

Sumber: Keerom dalam Angka tahun 2007

#### D. GEOLOGI

kabupaten Keerom secara morfologi merupakan dataran dengan kelerengan berkisar 0 – 15% dengan luas mencapai 2.306,03 Km<sup>2</sup>, perbukitan dengan kelerengan berkisar 15–40% dengan luas mencapai 445,72 Km<sup>2</sup> dan sisa daerah dengan luas 7.007,48 Km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terjal dengan kelerengan 40 - > 60%.

Dengan litologi penyusun dan sebarannya di stiap distrik sebagai berikut:

No	Distrik	1	2	3	4	5	6
1	Waris	34.400	-	-	-	5.600	-
2	Arso – Skanto	16.000	15.200	12.000	204.800	109.200	-
3	Senggi	6.400	-	-	235.500	-	1.600
4	Web	4.800	57.600	-	106.800	-	27.200

Sumber: Keerom dalam Angka tahun 2007

Keterangan:

1. Batuan beku, tuf, andesit, gabro, diabk, serpentin tersier, granit, diorite pratersier
2. Batuan sedimen pratersier, batugamping, batupasir, lempung, geneiss.
3. Batuan sedienn tersier, karang koral plestocen, batugamping.
4. Batuan sedimen tersier, napal
5. Deposit wartel (rawa) menutupi batuan sedimen tersier dan plestocen
6. Belum diteliti

## E. TATA RUANG

Konsep yang akan dipakai dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom yang secara garis besar mencakup 2 (dua) hal yaitu:

1. **Pemantapan Kawasan Lindung**, yang dilakukan dengan pengendalian aktivitas tertentu yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan tersebut. Pengembangan tertentu tersebut antara lain penyebaran dan pemadatan penduduk, penebangan hutan, akan mengurangi perlindungan lahan.
2. **Pengembangan Kawasan Budidaya**, yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan penduduk tanpa mengorbankan kelestarian alam. Dalam kawasan budidaya Kabupaten Keerom terdapat bermacam kegiatan, antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, konservasi dan permukiman termasuk di dalamnya dan lain sebagainya. Kawasan budidaya ini perlu diintensifkan pemanfaatannya secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pemantauan dan pengendalian yang mengurangi konflik antar kegiatan yang mempunyai dampak negatif.

Konsep penataan ruang inilah yang digunakan sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Keerom namun sebagai daerah pemakaran yang baru Kabupaten Keerom baru menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom, mengingat kabupaten Keerom secara geologi sangat rawan terhadap bencana, maka pada Tahun 2007 penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom yang digunakan sebagai acuan dalam meletakkan dasar – dasar pembangunan di Kabupaten Keerom.

## F. KESEHATAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang kesehatan yang terus ditingkatkan merupakan salah satu usaha untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 33 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan tahun 2006 atau bertambah 10%.

Jumlah tenaga kesehatan tahun 2007 tidak mengalami perubahan dari tahun 2006 yaitu dokter sebanyak 10 orang, perawat 103 orang, non perawat 21 orang dan tenaga non medis 4 orang.

Jumlah penderita penyakit berbagai jenis selama tahun 2007 sebanyak 84.310 penderita atau naik 3,77% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penderita terbanyak adalah penderita ISPA dengan 21.544 penderita, kemudian malaria klinis sebanyak 19.999 penderita dan penderita penyakit kulit sebanyak 12.868 penderita.

Banyaknya persalinan pada tahun 2007 sebanyak 657 atau naik 12,5% dibandingkan tahun 2005 sebanyak 578 bayi. Sedangkan bayi lahir hidup berjumlah 642 bayi dan bayi lahir mati berjumlah 15 bayi, masing – masing naik 11,07% dan 150% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 578 untuk bayi lahir hidup dan 6 untuk bayi lahir mati. Berdasarkan data di atas terjadi perbaikan kesehatan masyarakat.

## **BAB III**

# **AIR**

### **A. UMUM**

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Karenanya, harus dipahami bahwa segala aktivitas pembangunan dan segala aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia akan berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga terjadi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang berfungsi, atau tidak dapat lagi berfungsi, sesuai peruntukannya.

Sebagai kabupaten baru, maka kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Keerom yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta terciptanya efisiensi, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas hal ini disebabkan karena berdasarkan kondisi geomorfologi Kabupaten Keerom merupakan daerah dengan morfologi perbukitan yaitu 46,64% mempunyai kelerengan  $\pm 65\%$  ini berarti daerah tersebut rawan longsor, disamping itu kondisi geologi Kabupaten Keerom menunjukkan Kabupaten Keerom rawan bencana. Oleh karena itu kebijakan pembangunan harus bertumpu pada pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup sehingga dapat dihindari terjadinya bencana, seperti banjir dan longsor.

Pada awal pembentukannya institusi lingkungan merupakan salah satu bidang pada Bappeda Kabupaten Keerom dan seiring dengan perjalanan waktu di bentuk institusi khusus yang menangani lingkungan yaitu Bapedalda direncanakan akan akhir tahun 2008, maka belum dilakukan secara signifikan pendataan yang akurat terhadap kuantitas dan kualitas air di Kabupaten Keerom. Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom adalah pengamanan banjir dimana di sejumlah wilayah di Kabupaten Keerom merupakan langganan banjir.

Banjir merupakan fenomena alam yang dapat terjadi baik pada sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun maupun pada sungai yang memiliki aliran hanya pada musim penghujan saja dan umumnya banjir terjadi di dataran rendah yang merupakan



dataran banjir (flood plain) dan berada pada bagian hilir atau ruas tengah dan bawah dari alur sungai. Banjir ditimbulkan oleh kejadian alam dan atau sebagai aktifitas manusia. Banjir akibat kejadian alam disebabkan karena curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, aliran anak sungai tertahan oleh aliran induknya, sehingga terjadi akumulasi debit puncak banjir sungai pada waktu yang sama, terjadinya pembendungan air sungai di muara akibat pasang air laut, serta akibat adanya faktor geometri alur sungai berupa belokan – belokan (meandering river).

Akibat aktifitas manusia meliputi penebangan pada hulu – hulu sungai, adanya aktifitas pada hulu sungai menyebabkan tingginya sedimentasi pada sungai, pengembangan daerah permukiman di sepanjang tepi alur sungai, adanya perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang menyebabkan aliran permukaan (run off) menjadi besar, bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai tempat permukiman serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penebangan liar.

Data penyebab banjir maka banjir dapat dibedakan menjadi banjir limpasan dan banjir genangan. Berdasarkan pengertian di atas masalah banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Keerom terutama di Distrik Arso dan Distrik Skanto disebabkan oleh fenomena alam dan akibat aktifitas manusia. Banjir akibat fenomena alam di Kabupaten Keerom terutama akibat dari kondisi topografi dan kondisi geologi maka wilayah tersebut sangat rentan terhadap bencana banjir dan juga longsor sedangkan akibat aktifitas manusia, karena merupakan daerah pemekaran baru maka penggunaan lahan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana dan permukiman.

Upaya untuk mengatasi masalah banjir harus bersifat komprehensif yaitu fisik dan non fisik. Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah membuat bangunan pengendali banjir dan melengkapi bangunan pengendali banjir sedangkan upaya pengendali banjir secara non fisik seperti pengelolaan dataran banjir agar dapat mengantisipasi bila debit banjir terlampaui, penetapan sempadan sungai, pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang banjir bagi masyarakat, penegakan hukum dan pengelolaan sampah.

Sungai – sungai yang ada di kabupaten Keerom merupakan sungai yang besar. Sungai – sungai tersebut jika banjir akan yang mengangkut material, sedimen serta batang pohon, inilah mengakibatkan banjir yang terjadi di Distrik Arso dan Distrik Skanto sepanjang tahun. Banjir yang terjadi di Kabupaten Keerom

Tingkat sedimentasi yang cukup tinggi mengakibatkan pendangkalan pada sungai-sungai besar, kayu-kayu akibat penebangan liar pada hulu sungai akan menimbulkan banjir di Kabupaten Keerom



Gambar 1: Sungai – sungai di Kabupaten Keerom yang membawa Sedimen dan kayu - kayu Yang menyebabkan banjir di Distrik Arso dan Distrik Skanto

Disamping melakukan pengamanan terhadap banjir yang dapat merusak intake air bersih, Pemerintah Kabupaten Keerom melakukan survey terhadap standar penggunaan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Air bersih merupakan kebutuhan yang harus di penuhi, namun berdasarkan tatanan geohidrologi Kabupaten Keerom maka ground water (air bawah permukaan) di Kabupaten keerom dibagi menjadi tiga yaitu mandala air tanah daratan yang berada pada dataran rendah Tami dan dataran rendah Senggi, mandala air tanah batugamping tersebar di sekitar daerah perbatasan papua New Guinea, air sangat terbatas pada rekahan, celahan maupun saluran pelarutan dan mandala air tanah perbukitan menempati bagian selatan dataran Tami.

Dengan tiga tatanan groundwater tersebut maka untuk memenuhi standar air bersih bagi masyarakat Kabupaten Keerom maka pada tahun 2007 ini telah dilakukan survey terhadap sumber – sumber air bersih, dan pemasangan intake. Sampai saat ini yang menjadi masalah utama bagi ketersediaan air bersih adalah adanya kayu – kayu yang berasal dari bagian hulu serta sedimen yang cukup banyak menyebabkan pendangkalan sungai.



Gambar 2: Pengujian Air pada sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk Kebutuhan sehari – hari.

melakukan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya banjir melalui papan informasi dan penataan drainase pada perkebunan kelapa sawit.



Gambar 3: Papan Informasi dalam rangka sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dan Bahaya Banjir dan Penataan Drainase Pada Perkebunan Kelapa Sawit.

## **BAB IV UDARA**

### **A. U M U M**

Dalam rangka mengoptimalkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri maka Kabupaten Keerom tidak ketinggalan untuk memacu pembangunan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. maka kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Keerom yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta terciptanya efisiensi, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas hal ini disebabkan karena berdasarkan kondisi geomorfologi Kabupaten Keerom merupakan daerah dengan morfologi perbukitan yaitu 46,64% mempunyai kelerengan  $\pm 65\%$  ini berarti daerah tersebut rawan longsor, disamping itu kondisi geologi Kabupaten Keerom menunjukkan Kabupaten Keerom rawan bencana.

Kebijakan pembangunan harus bertumpu pada pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup sehingga dapat dihindari terjadinya bencana, seperti banjir dan longsor, pada awal pembentukannya institusi lingkungan merupakan salah satu bidang pada Bappeda Kabupaten Keerom dan seiring dengan perjalanan waktu di bentuk institusi khusus yang menangani lingkungan yaitu Bapedalda yang rencananya akan dibentuk tahun 2008, maka belum dilakukan secara signifikan pendataan yang akurat terhadap kuantitas dan kualitas udara di Kabupaten Keerom.

Belum dilakukan pendataan terhadap kuantitas dan kualitas udara di Kabupaten Keerom mengingat bahwa:

1. Kabupaten Keerom merupakan daerah pemakaran yang baru terbentuk pada tahun 2002;
2. Masih banyaknya hutan di Kabupaten Keerom yaitu seluas 841.856.96 Ha;
3. Belum banyaknya industri – industri besar;
4. Kendaraan di wilayah Kabupaten Keerom masih terbatas.

Dengan mempertimbangan berbagai hal tersebut, maka fokus utama dalam pembangunan daerah pemekaran adalah pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi standar sebagai daerah pementahan

Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Keerom tetap menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kedepan akan dilakukan survey/pengamatan kualitas udara yang akan digunakan sebagai data awal tentang kualitas udara di Kabupaten Keerom.



Gambar 4: kondisi hutan di Kabupaten Keerom yang masih virgin sehingga belum dilakukan pengujian kualitas udara

## BAB V

# LAHAN DAN HUTAN

### A. STATUS

Sebagai kabupaten pemekaran dengan hutan yang masih perawan maka berdasarkan pada data tahun 2007 dengan luas penutupan lahan 1.399.723,731 Ha yang terbagi atas Hutan alam 344.816,492 Ha atau 24,63%, Hutan Lahan kering 116.384,328 Ha atau 8,31%, Rawa 685 Ha atau 0.05%, perkebunan 12,661 Ha atau 0,001% Permukiman 529 Ha atau 0,04% ini berarti bahwa hutan di Kabuapten Keerom cukup luas, namun di setiap distrik di Kabupaten Keerom mulai terjadi lahan kritis walaupun jika dibandingkan dengan luas hutan yang menurut fungsinya mencapai 841.856.96 Ha maka lahan kritis tidak terlalu berarti secara signifikan. Namun keberadaaan lahan kritis ini harus diantisipasi sejak dini agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. Luas lahan kritis setiap wilayah maka untuk distrik Web luas lahan kritis mencapai 19.299 Ha atau 2,29%, Distrik Waris 20.938 ha atau 2,49%, Distrik Senggi 10.496 Ha atau 1,25%, Distrik Arso 90.058 Ha atau 10,70% dan Distrik Skanto 47.686 Ha atau 5,66% dengan total luas lahan kritis adalah 22,39%.

Distrik Arso dan Skanto mempunyai luas lahan kritis yang terbesar disebabkan karena Distrik arso merupakan daerah transmigrasi dan daerah Perkebunan Kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit saat ini sebagian besar dikelola oleh PTPN II Arso dengan luas 8.339 Ha dan sebagian besar dari lahan yang dikelola merupakan areal plasma dengan luas 3.600 Ha.



Gambar 5: Perkebunana Kelapa Sawit yang di kelola oleh PTPN II Arso

Disamping itu peningkatan lahan kritis terutama di distrik Arso dan Skanto yang disebabkan aktifitas manusia meliputi penebangan pada hulu – hulu sungai, adanya aktifitas pada hulu sungai menyebabkan tingginya sedimentasi pada sungai, pengembangan daerah permukiman di sepanjang tepi alur sungai, adanya perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang menyebabkan aliran permukaan (run off) menjadi besar, bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai tempat permukiman serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah menyebabkan terjadinya banjir. Berdasarkan penyebab banjir maka banjir dapat dibedakan menjadi banjir limpasan dan banjir genangan. Berdasarkan pengertian di atas masalah banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Keerom terutama di Distrik Arso dan Distrik Skanto disebabkan oleh fenomena alam dan akibat aktifitas manusia. Banjir akibat fenomena alam di Kabupaten Keerom terutama akibat dari kondisi topografi dan kondisi geologi maka wilayah tersebut sangat rentan terhadap bencana banjir dan juga longsor sedangkan akibat aktifitas manusia, karena merupakan daerah pemekaran baru maka penggunaan lahan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana dan permukiman. Upaya untuk mengatasi masalah banjir harus bersifat komprehensif yaitu fisik dan non fisik. Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah membuat bangunan pengendali banjir dan melengkapi bangunan pengendali banjir sedangkan upaya pengendali banjir secara non fisik seperti pengelolaan dataran banjir agar dapat mengantisipasi bila debit banjir terlampaui, penetapan sempadan sungai, pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang banjir bagi masyarakat, penegakan hukum dan pengelolaan sampah.

Sungai – sungai yang ada di kabupaten Keerom merupakan sungai yang besar. Sungai – sungai tersebut jika banjir akan yang mengangkut material, sedimen serta batang pohon, inilah mengakibatkan banjir yang terjadi di Distrik Arso dan Distrik Skanto sepanjang tahun.

## **B. RESPON**

Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten keerom dalam melaksanakan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan dan hutan adalah:

1. Penghijauan yaitu penanaman pohon pelindung, pohon produktif dan pohon atau tanaman hias lainnya.
2. Rehabilitasi dan pengembalian fungsi situ dan daerah sekitar situ sebagai satu kawasan lindung yang berfungsi sebagai tandon air.
3. Pembebasan sempadan sungai dari permukiman dan yang lainnya yang menyebabkan fungsi sempadan sungai sebagai penahan longsor menjadi tidak sempurna dan menggantinya dengan penanaman pohon-pohon pelindung guna mengembalikan fungsi sempadan sungai.
4. Melibatkan RT/RW di setiap kelurahan untuk menggalakkan menanam pohon di

sekitar pekarangan rumah

5. Menghimbau setiap warga untuk untuk tidak melakukan penebangan serta perladangan berpindah pada daerah – daerah perbukitan.
6. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun di sempadan sungai
7. Memberikan sanksi hukum yang tegas apabila melanggar ketataruangan
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya penebangan dan pembakaran hutan.
9. Membuat papan informasi sebagai himbuan kepada masyarakat.
10. Selektif dalam penentuan lokasi untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan dikaji dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (Dokumen AMDAL).

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Keerom tidak lepas dari strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Keerom yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Keerom dengan memperhatikan Kebijakan Pembangunan berwawan lingkungan sebagai berikut:

No	Jenis Kawasan	Tujuan Pemantapan Kawasan	Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang
<b>1</b>	<b>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya</b>		
	a. Kawasan Hutan Lindung	Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan hutan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32/1990 melalui pengukuran dan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya.</li> <li>• Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada/penggunaan lahan yang berlangsung lama.</li> <li>• Pengendalian hidro-orologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi).</li> <li>• Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.</li> <li>• Pemantauan terhadap kegiatan yang di perbolehkan,berlokasi di hutan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam agar tidak mengganggu fungsi lindung.</li> </ul>
	b. Kawasan Bergambut	Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.	Sebagai daerah tangkapan air, dapat diolah menjadi kawasan produktif dengan sentuhan teknologi tetapi memerlukan biaya yang sangat mahal.



No	Jenis Kawasan	Tujuan Pemantapan Kawasan	Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang
	c. Kawasan Resapan Air	Melindungi kawasan resapan air dari bahaya polusi tanah, air atau udara akibat kegiatan pembangunan.	Pengendalian fungsi hidrologis sehingga kualitas dan keutuhan air tetap bersih dapat selalu terjaga serta tersedia.
<b>2</b>	<b>Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam</b>		
	a. Kawasan Suaka Alam	Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan flasma muftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan suaka alam (cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan wisata) sesuai perlindungannya masing-masing.</li> <li>• Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.</li> </ul>
	b. Taman Wisata dan Cagar Alam	Pengembangan pendidikan dan penelitian perlindungan flora dan fauna, sumber alam untuk rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan taman nasional (didalamnya termasuk cagar alam dan suaka margasatwa) dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan.</li> <li>• Pengelolaan wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian pariwisata/rekreasi alam.</li> <li>• Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	a. Sempadan Pantai dan Sungai	Melindungi daerah sempadan pantai dan aliran sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai dan sungai serta mengamankan aliran sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disepanjang sempadan pantai dan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai dan sungai serta alirannya</li> <li>• Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar daerah sempadan pantai dan aliran sungai</li> <li>• Pengamanan daerah tepi pantai dan aliran sungai</li> </ul>

No	Jenis Kawasan	Tujuan Pemantapan Kawasan	Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang
	b. Kawasan Sekitar Mata Air	Melindungi kawasan mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi atau fisik sekitar mata air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar kawasan mata air yang dapat mengganggu fungsi kawasan mata air.</li> <li>• Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar kawasan mata air.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>		
		Melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir.</li> <li>• Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor.</li> <li>• Pengaturan pemanfaatan lahan daerah hulu.</li> </ul>

**Sumber: Hasil Rencana 2006**

Kawasan lindung harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan kawasan. Untuk penentuan arahan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan lindung perlu terlebih dahulu dikenali tujuan dan sasaran pemanfaatan kawasan tersebut.

Secara umum tujuannya adalah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan. Sedangkan sasarannya, adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidro-orologis).
2. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam.

**BAB VI**  
**KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**A. STATUS**

Kabupaten Keerom dengan hutan yang masih virgin menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, namun hingga saat ini belum dilakukan identifikasi secara komprehensif. Beberapa jenis diantaranya seperti kayu besi dan matoa, merupakan jenis kayu berkelas dan mempunyai harga pasar yang sangat tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebaran relatifnya di Kabupaten Keerom sebagai berikut:

No.	Nama Dagang / Nama Lokal	Nama Ilmiah	Sebaran Relatif	Kelas Kayu (Kuat)
1.	Kuku, Joemouk, Dore, Kayu Besi	<i>Pericopsis mooniana</i>	+++	I
2.	Merbau, Bayam, Ipi, Mirabow, Kayu Besi	<i>Intsia spp.</i>	++++	I
3.	Hiya, Gia	<i>Homalium foetidum</i> Benth.	+++	I - II
4.	Laban, Kalapapa	<i>Vitex pubescens</i>	++++	I - II
5.	Matoa, Kasai, Sapen, Lingsar, Jagir	<i>Pometia spp.</i>	+++++	II
6.	Linggoa, Sonokembang, Amboyna	<i>Pterocarpus indicus</i> Wild.	++++	II
7.	Nyirih, Ngiri	<i>Xylocarpus granatum</i> Koen.	+++	II
8.	Rasak, Aboh	<i>Vatica spp.</i>	++	II
9.	Pasang, Baratura, Warakas	<i>Quercus spp.</i>	+++	I - III
10.	Nyatoh, Balam, Sunde, Suntain	<i>Paluquium spp.</i>	+++	II - III
11.	Bawang, Surian bawang	<i>Melia excelsa</i> Jack.	+++	II - III
12.	Agathis, Damar, Kauri	<i>Agathis spp.</i>	+++	III
13.	Cempaka, Baros	<i>Elmerillia spp.</i>	++++	III - IV
14.	Dahu, Paldao, Rau	<i>Dracontomelon mangiferum</i>	++	III - IV
15.	Surian, Ingu, Alipega	<i>Toona sureni</i> Merr.	+++	III - IV
16.	Medang, Huru, Tubulo	<i>Litsea spp.</i>	+++	II - V
17.	Pulai, Lame, Stoolwood	<i>Alstonia spp.</i>	++++	IV - V

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Keerom (2006), dan Hasil Survei Lapang

Selain sebagai penghasil kayu, sumberdaya hutan di Kabupaten Keerom juga merupakan habitat bagi berbagai flora fauna endemik dan eksotis. Salah satu fauna endemik yang dapat dijumpai di hutan-hutan Kabupaten Keerom adalah kangguru pohon mantel emas (*Dendrolagus pulcherrimus*).



Gambar 6. Kangguru Pohon Mantel Emas (*Dendrolagus pulcherrimus*)

## B. TEKAMAN

Sebagai daerah pemekaran yang baru tentu saja terjadi pembukaan kawasan untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastuktur dalam konteks terbentuknya suatu Pemerintahan baru.

Pembukaan lahan yang tidak memperhatikan keberadaan lingkungan tentu saja menjadi masalah bagi keberadaan flora dan fauna endemik.

Adanya kayu dengan kualitas terbaik serta fauna yang langka mendorong terjadinya penebangan liar dan perburuan yang cukup mengkhawatirkan.

Disamping itu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawitpun dapat mengancam keberadaan habitat yang ada.

## C. RESPON

Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten keerom untuk menjaga keanekaragaman hayati:

### 1. Pengendalian Kawasan Lindung

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan lindung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, melalui instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung pada keseluruhan wilayah Kabupaten Keerom, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan lindung yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **2. Pengendalian Kawasan Budidaya**

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, melalui instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya pada keseluruhan wilayah Kabupaten Keerom, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan budidaya yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c. Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.
- d. Pembukaan daerah daerah baru melalui prosedur Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaua Lingkungan (UPL) sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan yang berlaku.

## **3. Pengawasan Dalam Kegiatan pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung**

- a. Pemberian larangan melakukan kegiatan sebagai kegiatan usaha komersial, kecuali sebagai usaha yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang dan ekosistem alami.
- b. Pengaturan berbagai usaha dan atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung.
- c. Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.
- d. Pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi sumberdaya mineral/tambang serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.
- e. Ketentuan-ketentuan pengendalian ini diatur dalam PERDA yang didasarkan pada undang-undang, dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

## **4. Pengawasan Dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya**

- a. Untuk setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak, maka perlu dilakukan/dilengkapi dengan pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan atau kegiatan, terutama yang berskala besar.

- b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan atau kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang dikawasan budidaya, agar terlaksana keserasian antara kegiatan pemanfaatan ruang dikawasan budidaya.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi sumberdaya mineral dari air, tanah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budidaya agar tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup, keamanan, kelanjutan usaha dan atau kegiatan lainnya.
- d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang dikawasan budidaya

**5. Kegiatan penertiban pada kawasan lindung dilakukan melalui:**

- a. Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- b. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang dilaksanakan secara bertahap.
- c. Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah/kawasan pertambangan bahan galian.

**6. Kegiatan penertiban pada kawasan budidaya dilakukan melalui:**

- a. Penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan yang akan dibangun telah sesuai dengan peruntukkan ruang dan kegiatan yang direncanakan
- b. Dalam pemberian perizinan mendirikan bangunan pemerintah daerah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

## BAB VII PESISIR DAN LAUT

### A. STATUS

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Keerom memfokuskan kebijakan pada potensi perikanan air tawar yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Keerom diutamakan untuk budidaya perikanan air tawar. Pengembangan kawasan perikanan lebih diarahkan pada skala kecil keluarga yang terintegrasi dengan aktivitas pertanian terutama tanaman pangan lahan basah. Berdasarkan ketersediaan air dan bentuk wilayah, didapatkan lahan potensial untuk pengembangan perikanan seluas 319 ha yang tersebar di semua distrik sebagai berikut:

**Kawasan Perikanan Di Wilayah Kabupaten Keerom**

NO.	DISTRIK	KAWASAN PERIKANAN (HA)
1	Arso	112
2	Senggi	101
3	Skanto	51
4	Waris	29
5	Web	25
<b>Jumlah (ha)</b>		<b>319</b>

Sumber: Hasil Analisis SIG (2006)

Kebijakan pengembangan perikanan selain diarahkan sebagai usaha tani utama, juga diharapkan dapat menjadi penunjang budidaya pertanian lainnya. Dengan demikian, petani dapat lebih mengembangkan diversifikasi usaha yang berorientasi pada peningkatan produktivitas lahan, dan menunjang ketahanan pangan terutama penyediaan protein hewani.

## BAB VIII LINGKUNGAN PERMUKIMAN

### A. STATUS

Kabupaten Keerom yang terdiri dari 5 (lima) Distrik dengan kondisi kependudukan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Penduduk di Distrik Waris Kehidupan penduduk di Distrik Waris, sebagian besar masyarakat tinggal di sepanjang Sungai Pai, 6 (enam) kampung di Distrik Waris semuanya berada di pinggir sungai Pai. Karena kehidupan mereka tidak terlepas dengan air.

Kepadatan penduduk di Distrik Waris sebesar 0,93 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini jika dibandingkan dengan distrik lainnya termasuk daerah dengan kepadatan yang cukup rendah. Jumlah penduduk hanya sebesar 3582 jiwa. Sebagian besar penduduk adalah usia produktif.

2. Penduduk di distrik Senggi karakteristiknya dipengaruhi oleh penduduk pendatang, karena daerah ini terdapat daerah transmigrasi. Perbauran antara penduduk asli dan pendatang berjalan dengan baik. Penduduk di Distrik Senggi ini berjumlah 3483 jiwa dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar mencapai 11,31 jiwa/tahun. Sedangkan kepadatan penduduknya sebesar 1,35 jiwa/km<sup>2</sup>.

3. Jumlah penduduk Distrik Skanto sebanyak 13.875 jiwa pada tahun 2003 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 8,50 jiwa pertahun. Kepadatan penduduk mencapai 6,14 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Distrik Skanto ini berusia produktif.

Mobilisasi penduduk untuk melakukan transaksi perdagangan, pendidikan serta kebutuhan lainnya, penduduk Distrik Skanto mengarah ke Distrik Arso dan Jayapura. Penduduk Skanto sebagian berasal dari pendatang transmigran.

Konsentrasi penduduk di Kabupaten Keerom terdapat di Distrik Arso, hal ini terlihat dengan kepadatan penduduk mencapai 50,57% dari jumlah penduduk di Kabupaten Keerom dengan pertumbuhan penduduk mencapai 3,83% per tahun. Dan kepadatan penduduk mencapai 9,90 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk berusia produktif.

4. Penduduk distrik Arso sebagian besar merupakan transmigran (pendatang) yang berkembang dengan pesat, selain itu juga pemusatan kegiatan terdapat di distrik ini. Karakteristik masyarakat di Distrik Arso ini hampir dengan Distrik Skanto. Penduduk di Distrik Arso sebagian besar berasal dari transmigran pulau Jawa. Sehingga pola perilaku dan sikap masyarakat sehari-hari layaknya orang Jawa.



5. Distrik Web terdiri dari 6 (enam) kampung dengan jumlah kepala keluarga masing-masing sebagai berikut : Kampung Muab = 74 KK, Kampung Imbi = 68 KK, Kampung Yuruf = 50 KK, Kampung Amgroto = 84 KK, Kampung Dobu = 72 KK dan Kampung Somografi = 95 KK. Usia harapan hidup di distrik Web mencapai 50 – 60 tahun.

Penduduk di Distrik Web pada umumnya merupakan penduduk asli, sedangkan penduduk pendatang dapat dikatakan sangat sedikit. Tetapi mobilisasi masyarakat di Distrik Web cukup tinggi dengan seringnya mereka pergi (dengan menggunakan fasilitas heli dari TNI AU) turun menuju ke Jayapura untuk menjual hasil alam dan pertanian mereka.

Pada umumnya usia pernikahan penduduk di distrik Web pada usia 14 tahun. Kecenderungan pemuda dan pemudi melakukan hubungan seks bebas sehingga banyak yang hamil di luar nikah (usia antara 16 – 17 tahun).

## B. TEKAMAN

Dengan budaya masyarakat Kabupaten Keerom yang berbeda antar tiap distrik menyebabkan beberapa dampak yang terjadi sebagai berikut:

No	Kondisi Saat ini	Dampak/Pengaruh terhadap Perencanaan Sektor Sosbud	Rencana Yang Perlu Dilakukan
1	Penduduk asli Papua yang terdapat di Kab. Keerom ketergantungan terhadap SDA sangat tinggi	Kerusakan SDA mengakibatkan masyarakat asli kehilangan penghasilan	Peningkatan pendidikan dan keterampilan; meningkatkan peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat; pengembangan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan.
2	Pendidikan Masyarakat Kabupaten Keerom masih rendah	Rendahnya masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	Peningkatan pendidikan dan sarana prasarana pendidikan
3	Tempat tinggal penduduk (asli) pada umumnya disekitar hutan/bantaran sungai	Penyebaran penduduk tidak merata sehingga menyebabkan komunikasi antar wilayah kurang	Penyebaran penduduk yang lebih merata ke arah daratan serta membuka akses jalan di setiap daerah terpencil
4	Penyebaran penduduk yang tidak merata di Kabupaten Keerom	Pengembangan pembangunan yang tidak merata menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduk juga tidak merata bahkan sangat jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembangunan di wilayah pengembangan  Pengembangan jaringan komunikasi dan transportasi

No	Kondisi Saat ini	Dampak/Pengaruh terhadap Perencanaan Sektor Sosbud	Rencana Yang Perlu Dilakukan
5	Ladang berpindah penduduk asli yang ditinggal selama 20 tahun	Masyarakat pendatang menempati lahan kosong (sebenarnya punya penduduk asli) sehingga menimbulkan konflik	Perlu adanya kepastian hukum lahan dan tata guna lahan; peningkatan kemantapan status kawasan hutan berbasis pengakuan kemasyarakatan;
6	Kerusakan hutan adalah pemilik HPH notabene adalah pendatang atau transmigran	Mereka hanya mengambil kayunya saja tanpa melakukan rehabilitasi hutannya kembali	Peningkatan penegakan hukum dan peninjauan peraturan yang ada dalam pengelolaan hutan. Illegal logging
7	Pola hidup masyarakat asli selalu ingin instan tidak mau sulit dan bekerja berat	Ketertinggalan dalam peningkatan kesejahteraan dan keterampilan	1. Transformasi pengetahuan dan keterampilan dengan meniru pola pertanian transmigran atau kegiatan ekonomi pendatang 2. Perlu adanya peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan pada generasi muda (ke - 2) agar pola hidup dan pola pikir mereka dapat berubah
8	Adanya imbas terjadinya konflik antar suku di Papua	Penurunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi wilayah Keerom	Pembangunan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat asli dan pendatang selalu berbaur dan menyatu.

### C. RESPON

#### 1. Masyarakat dan Konflik

Inti dari konflik adalah perbedaan kepentingan. Yang satu mau mencari keuntungan besar tanpa memperhitungkan hak orang lain. Perbedaan kepentingan ini dapat menjadi suatu gangguan apabila tidak ada suatu dasar persamaan yang membantu untuk mengatasi perbedaan itu.

Dalam buku Memahami Budaya Damai dan Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik di Papua (2006) untuk memahami inti suatu konflik dan dapat membantu menemukan jalan untuk mengatasinya.

1. Dimanakah letak perbedaan kepentingan?
2. Adakah suatu kesamaan nilai, suatu kesepakatan mengenai prioritas atau wajarnya kepentingan yang diperjuangkan?
3. Apakah kekuatan nilai masih mampu mengalahkan perbedaan kepentingan, kedudukan, kekuasaan, kebiasaan yang melatarbelakangi konflik?

Salah satu konflik yang terjadi di tanah Papua, khususnya Kabupaten Keerom yaitu konflik seputar tanah. Tanah di wilayah tersebut tidak dapat benar-benar dijual. Pada awalnya, masyarakat desa menyediakan lahan bagi lembaga keagamaan untuk membangun tempat ibadah dan sekolah, serta penyediaan rumah bagi guru-guru. Pemerintahan kolonial juga memerlukan tanah untuk mendirikan bangunan, serta membangun kota, jalan dan bandara udara. Hingga kini, anak dan cucu bekas pemilik tanah telah berulang kali meminta pembayaran ganti rugi. Tuntutan itu tentu saja juga merupakan cara mendapatkan penghasilan tambahan. Penduduk kota pada umumnya telah menyadari bahwa hak-hak tradisional mereka sudah tak berlaku lagi. Siapapun yang secara sah mendapatkan tanah yang dilengkapi dengan akte tanah yang berlaku, dan tercatat dalam buku pejabat terkait, adalah pemilik baru. Meskipun demikian, pada saat itulah hak-hak tradisional dan hukum modern saling bertubrukan – sebuah situasi yang seringkali memicu konflik. Penduduk yang tinggal di pinggiran kota juga mengetahui bahwa menjual tanah dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, dan mereka memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pola penguasaan tanah dimana keterikatan penduduk atas kawasan tanah atau hutan adat yang diklaim sebagai hak, tidak jarang terjadi menjadi persoalan pelik bagi para perencana pembangunan. Penduduk yang terkena program *resettlement* sejak tahun 1986 mereka sangat terikat dengan wilayah adat mereka, karena pada saat sebelum direlokasikan di lokasi perkampungan seperti saat ini, mereka menempati kampung-kampung tua mereka yang mungkin dalam konsepsi pemerintah maupun TNI sangat sulit dijangkau sehingga menghambat proses pembangunan dan pelayanan yang akan diberikan. Dengan kondisi tersebut, upaya migrasi penduduk untuk kembali bermigrasi kembali perkampungan yang dulu pernah ditempati sangat besar. Motivasi bermigrasi kembali tersebut dilatari oleh sejumlah alasan logis, karena selain sebagai upaya pengamanan tanah/hutan adat mereka, tetapi jika mereka tetap bertahan di lokasi perkampungan saat, maka akses pemanfaatan tanah mereka sangat terbatas. Proses perubahan yang mendasar, yakni ketika masih berlangsungnya perang antar suku dan ketika memasuki masa dimana tidak lagi terjadi perang. Akibatnya yang terjadi adalah tumpang tindihnya pengakuan atas tanah adat.

## **2. Potensi Sumber Daya Manusia**

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sudah sepatutnya dapat memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya setempat dan tentunya dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya alam.

Empat elemen dasar kehidupan sosial dan pembangunannya sesuai dengan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik – International Covenants On Civil and Political Rights (ICCPR) dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – *International Economical, Social and Cultural Rights (ICESR)*, yaitu : (1) Komponen demografis dari masyarakat, (2) Pemerintahan atas masyarakat, (3) Pendidikan, (4) Layanan kesehatan

## **BAB IX**

### **AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. UMUM**

Dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan harus merupakan pedoman bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Sustainable development menjadi pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka untuk mengantisipasi pembangunan di Kabupaten Keerom diperlukan suatu arahan kebijaksanaan dalam pelestarian lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Secara umum, hal ini dapat diwujudkan dengan:

1. Mempertahankan kondisi lingkungan dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan keberadaan flora dan fauna.
2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam hayati, termasuk flora dan fauna guna melindungi dan menjamin kesinambungan keberadaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pola tata ruang yang mensejajarkan tata guna tanah, air serta sumber daya alam dalam satu kesatuan yang dinamis serta ditunjang oleh perkembangan penduduk yang serasi.
4. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan.
5. Menumbuhkembangkan kesadaran di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam kehidupan manusia melalui penerangan dan pendidikan, pemberian penghargaan, penegakan hukum, dan mendorong peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, berbagai akibat pembangunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup perlu ditangani secara cermat dan terencana dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan yang ada. Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan adalah:

#### **B. PROGRAM PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN**

Program ini dimaksudkan guna mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, penurunan beban pencemaran lingkungan serta menstabilkan dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan:

1. Penghijauan yaitu penanaman pohon pelindung, pohon produktif dan pohon atau tanaman hias lainnya.

2. Rehabilitasi dan pengembalian fungsi situ dan daerah sekitar situ sebagai satu kawasan lindung yang berfungsi sebagai tandon air.
3. Penerapan pembuatan sumur resapan sejalan dengan pendirian bangunan guna mengantisipasi kekeringan air tanah dan intrusi air laut akibat pemanfaatan air tanah yang tidak seimbang dengan ketersediaannya.
4. Pembebasan sempadan sungai dari permukiman dan yang lainnya yang menyebabkan fungsi sempadan sungai sebagai penahan longsor menjadi tidak sempurna dan menggantinya dengan penanaman pohon-pohon pelindung guna mengembalikan fungsi sempadan sungai.
5. Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai dengan upaya pengendalian kualitas air sungai sesuai baku mutu yang ditetapkan.

### **C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Program ini dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi tingkat pencemaran terhadap lingkungan dengan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemaran (industri dan kegiatan usaha lainnya) agar mengolah limbah yang dikeluarkan sebelum membuangnya ke lingkungan sebagai satu-satunya tempat yang ada di dunia untuk menampung segala bentuk limbah baik di tanah, di air maupun di udara.

### **D. RINCIAN TINDAK LANJUT**

Program-program yang dikemukakan di atas bersifat umum, sedang yang bersifat khusus adalah yang berkaitan isu-isu lingkungan sebagaimana yang dikemukakan. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaitan dengan isu-isu tersebut.

#### **1. Tentang Isu Banjir**

Masalah banjir adalah masalah yang sepanjang tahun selalu terjadi di Kabupaten Keerom. Oleh karena itu kabupaten Keerom melalui program ke depan akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menanggulangi banjir antara lain:

- a. Program pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan sumber air lainnya dengan kegiatan:
  - Pemeliharaan/Normalisasi sungai skamto dan Sungai Tami
  - Pembuatan talud pada jembatan Sungai Waisamba
- b. Program Pengendalian Banjir
  - Penataan jaringan rawa/pengendalian banjir
- c. Program Penataan Ruang
  - Master plan penanggulangan Banjir di Arso dan Skamto
  - Pembuatan desain jaringan drainase

Program – program inilah yang akan diterapkan pada tahun depan untuk mengurangi serta mengantisipasi banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Keerom.

**a. Aspek Keterlibatan Masyarakat**

- Melibatkan RT/RW di setiap kelurahan untuk menggalakkan menanam pohon di sekitar pekarangan rumah
- Menghimbau setiap warga untuk tidak melakukan penebangan serta perladangan berpindah pada daerah – daerah perbukitan.
- Menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun di sempadan sungai.

**b. Aspek Pemerintah**

- Memberikan sanksi hukum yang tegas apabila melanggar ketataruangan
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya banjir.
- Membuat papan informasi sebagai himbuan kepada masyarakat.

**2. Tentang Isu Pembukaan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sebagai Daerah Pemekaran baru, Kabupaten Keerom sekarang ini sedang berpacu dalam pembangunan. Pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana menjadi hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu untuk meminimalkan terjadinya bencana pada Tahun 2006 telah melakukan master plan jalan dan jembatan maksudnya agar pembangunan jalan dan jembatan mempertimbangkan lingkungan, melakukan studi pengembangan sarana perkotaan dan ketataruangan agar pembangunan yang dilaksanakan benar – benar mempertimbangkan lingkungan.

**3. Tentang Isu Perladangan Berpindah**

Sebagai masyarakat peramu yang masih bergantung dengan alam/ hutan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, maka perladangan berpindah menjadi hal yang biasa. Namun menjadi kendala apabila perladangan berpindah tersebut melakukan penebangan dan pembakaran hutan sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu pada tahun ke depan akan dilakukan kegiatan

- Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan bahaya perladangan berpindah dengan cara menebang dan membakar hutan;
- Memberikan solusi serta alternatif lain untuk melakukan aktifitas perladangan yang berwawasan lingkungan.
- Menyediakan lahan untuk dijadikan ladang/kebun pada daerah yang sesuai untuk ladang/kebun rakyat.

#### **4. Tentang Penyediaan sumber Air Bersih sesuai Standar**

Air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia harus dapat dijamin tentang kualitasnya. Untuk itu dilakukan program penyediaan dan pengelolaan air baku yang bertujuan agar air yang di minum oleh masyarakat di Kabupaten Keerom sesuai dengan standar kesehatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penyediaan air bersih bagi masyarakat
- Survey sumber air bersih
- Pemasangan intake dan pengadaan pipa air bersih.
- 

#### **5. Tentang Pengujian kualitas Air (Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup).**

Aspek pengelolaan lingkungan hidup akan berjalan efektif dan efisien apabila di dukung dengan Laboratorium Lingkungan yang mampu menghasilkan data yang absah tidak terbantahkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Hal ini dikarenakan data kualitas lingkungan yang handal dapat dipakai sebagai indikasi adanya pencemaram lingkungan serta sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu, data kualitas lingkungan merupakan dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup.

Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai "Kemampuan" dan "kewenangan" melaksanakan pengujian parameter kimia/fisika/biologi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini "kemampuan" berarti laboratorium harus dapat menunjukkan kompeternsinya dalam menghasilkan data kualitas lingkungan secara akurat, jelas, tidak meragukan dan objektif serta sesuai peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan "kewenangan" berarti telah mendapat pengakuan formal dari Kementrian Lingkungan Hidup lingkungan sehingga laboratorium yang bersangkutan dapat melakukan penngujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka menunjang pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya pemenuhan mutu kehidupan manusia yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu upaya pengelolaan lingkungan hidup akan berjalan efektif dan efisien apabila didukung dengan adanya laboratorium dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup dari Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2008



Selain berperan sebagai pembina laboratorium lingkungan dan pusat pemantauan kualitas lingkungan, Laboratorium lingkungan juga dikembangkan untuk dapat melakukan pelayanan masyarakat/jasa di bidang laboratorium lingkungan yang profesional dan mandiri.

Laboratorium melakukan tugas dan fungsi antara lain:

Melaksanakan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan, verifikasi perbedaan data hasil pemantauan oleh dua atau lebih laboratorium, peningkatan kapasitas dan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, melaksanakan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan.

## **E. PENUTUP**

Dalam merealisasikan program-program di atas pemerintah Kabupaten Keerom memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang merupakan ujung tombak di lapangan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Keerom diupayakan dalam setiap kesempatan baik dalam forum formal dalam pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, lokakarya atau lainnya maupun secara informal melalui pertemuan-pertemuan di tempat ibadah, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya.

Penyebaran informasi tentang lingkungan perlu terus dilaksanakan guna menambah wawasan masyarakat sebagai stakeholder pembangunan akan pentingnya keberadaan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dapat terlaksana maksimal dengan tanpa menimbulkan permasalahan lingkungan lainnya yang mengarah kepada kehancuran.

## DAFTAR PUSTAKA

Asisten Deputi Urusan Informasi Deputi Urusan Data dan Informasi Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, 2008, *Panduan Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2008*, Jakarta

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Keerom, 2007, Kabupaten Keerom

Laporan Satus Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Keerom (Laporan SLHD) Tahun 2007, Kabupaten Keerom

Pemerintah Kabupaten Keerom (Dalam Angka) 2007, Kabupaten Keerom.

Susilo, K., 2000, *Kebijakan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Paper Presented at National Workshop of Department of Exploration and Fishery*, Jakarta.